Jurnal JISIPOL
Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung
Volume 9, Nomor 1, Januari 2025 (22-43)
(P-ISSN 2087-474X) (E-ISSN 3047-4272

POLITIK DINASTI DAN TANTANGAN DEMOKRASI: KAJIAN FILOSOFIS MACHIAVELLI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ADIL DI INDONESIA

[1]Hilarion Gerri Parto, [2]Yuita Nadila, & [3]Robertus Wijanarko
[1] Filsafat Keilahian, Fakultas Filsafat Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Malang
gerriparto@gmail.com
[2] Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan, Universitas Kanjuruhan, Malang
nadilot7898@gmail.com
[3]Filsafat Keilahian, Fakultas Filsafat Teologi, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Malang
yrnang@yahoo.com

Received 25 December 2024; Revised: 2 Januari 2025; Accepted: 2 Januari 2025; Published: Januari 2025; Available online: Januari 2025

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena politik dinasti di Indonesia melalui perspektif filosofis Niccolò Machiavelli dalam rangka mewujudkan tata kelola yang adil. Politik dinasti, yang semakin meluas pasca-reformasi, memunculkan tantangan serius bagi demokrasi, terutama dalam hal transparansi, partisipasi rakyat, dan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, mengkaji karya-karya utama Machiavelli, seperti *Il Principe* dan *Discourses on Livy*, serta literatur sekunder yang relevan dengan politik dinasti di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Machiavellian, seperti penggunaan kekuasaan untuk kepentingan stabilitas negara, dapat menjadi bahan refleksi dalam menghadapi tantangan politik dinasti. Namun, penting untuk menyesuaikan gagasan tersebut dengan nilai-nilai demokrasi modern. Artikel ini merekomendasikan penguatan institusi demokrasi lokal sebagai langkah strategis untuk mengatasi dampak negatif politik dinasti dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih adil di Indonesia.

***Kata Kunci*: Politik Dinasti, Demokrasi, Niccolò Machiavelli, Tata Kelola, Indonesia**

ABSTRACT

This article aims to analyze the phenomenon of political dynasties in Indonesia through the philosophical perspective of Niccolò Machiavelli to establish fair governance. Political dynasties, which have expanded significantly post-reform, pose serious challenges to democracy, particularly regarding transparency, public participation, and governmental accountability. This research employs a qualitative library method, examining Machiavelli's seminal works, such as The Prince and Discourses on Livy, alongside secondary literature on

Indonesia's political dynasties. The findings suggest that Machiavellian principles, such as the use of power for state stability, can serve as a reflective tool to address the challenges of political dynasties. However, these ideas need to be aligned with modern democratic values. The article recommends strengthening local democratic institutions as a strategic measure to mitigate the negative impacts of political dynasties and to achieve fair governance in Indonesia.

Key Word: Political Dynasties, Democracy, Niccolò Machiavelli, Governance, Indonesia

PENDAHULUAN

Praktik politik dinasti di Indonesia bukanlah fenomena baru. Sejak era pra-reformasi, politik berbasis kekerabatan telah terlihat di tingkat pemerintahan pusat, di mana kekuasaan sering kali diwariskan atau dilanjutkan dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat pemimpin yang sedang berkuasa (Surpi, 2019). Pola politik dinasti pada masa tersebut lebih sering terjadi di kalangan elite pemerintahan pusat, di mana posisi-posisi penting sering kali dijabat oleh individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan tokoh-tokoh utama di pemerintahan. Namun, pasca reformasi, politik dinasti tidak hanya terbatas pada pemerintahan pusat. Justru, tren ini semakin masif dan meluas di tingkat pemerintahan daerah, terutama seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (Rahadatul'Aisy, n.d.). Dalam beberapa dekade terakhir, pemilihan kepala daerah seringkali menunjukkan keterlibatan tokoh-tokoh dari keluarga yang sama dalam berbagai posisi kekuasaan di pemerintahan local (Suprana, 2021). Masifnya praktik politik dinasti di pemerintahan daerah ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Praktik politik dinasti sering kali diiringi dengan meningkatnya risiko terjadinya korupsi (Dewi, 2019). Dalam kondisi di mana jaringan kekuasaan berpusat pada lingkup keluarga, kontrol dan pengawasan menjadi lemah karena para pengawas mungkin enggan untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dinasti tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2022 menunjukkan bahwa sekitar 61% masyarakat Indonesia percaya bahwa politik dinasti berkontribusi pada meningkatnya praktik korupsi di pemerintahan (Herianto & Wijanarko, 2022). Selain itu, laporan Transparency International pada 2021 mencatat bahwa sebagian besar daerah dengan kasus korupsi kepala daerah yang tinggi juga merupakan wilayah dengan dominasi politik dinasti (Suprana, 2021). Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), yang menemukan bahwa sebanyak 86

kepala daerah yang terlibat kasus korupsi antara 2010-2021 memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat sebelumnya (Herianto & Wijanarko, 2022). Temuan ini memperlihatkan korelasi signifikan antara politik dinasti dan tata kelola pemerintahan yang buruk.

Dalam pandangan filsafat politik, isu ini menarik untuk dikaji melalui pemikiran Niccolò Machiavelli. Sebagai salah satu tokoh besar filsafat politik, Machiavelli menawarkan wawasan mendalam tentang kepemimpinan, kekuasaan, dan tata kelola negara yang efektif. Melalui karya utamanya, The Prince dan Discourses on Livy, ia menunjukkan bahwa keberhasilan pemimpin tidak hanya tergantung pada keberuntungan (fortuna), tetapi juga pada kemampuan (virtù) untuk mengendalikan kekuasaan dan menciptakan stabilitas (Fawzan et al., 2023).

Niccolò Machiavelli (1469–1527) adalah seorang diplomat, filsuf, dan penulis asal Italia yang dikenal sebagai salah satu bapak pendiri ilmu politik modern. Ia lahir di Florence, sebuah kota yang pada masa itu merupakan pusat budaya dan politik Eropa (Nurkholis, 2021). Machiavelli hidup dalam periode yang penuh gejolak, di mana Italia terpecah menjadi berbagai kerajaan kecil yang saling bersaing. Kejatuhan Florence di bawah kekuasaan keluarga Medici, invasi asing, dan intrik politik internal menjadi bagian dari pengalaman hidupnya. Sebagai diplomat dan pegawai negara, Machiavelli terlibat langsung dalam upaya mempertahankan kedaulatan Florence. Namun, setelah keluarga Medici kembali berkuasa pada 1512, ia diasingkan dari pemerintahan, bahkan pernah dipenjara atas tuduhan konspirasi. Kehidupan politik yang penuh dinamika ini menjadi latar belakang pemikiran Machiavelli. Ia melihat bahwa kekuasaan sering kali tidak ditentukan oleh moralitas atau keadilan, tetapi oleh kecerdasan, strategi, dan kemampuan untuk memanfaatkan situasi. Pemikiran Machiavelli dapat menjadi alat kritis untuk memahami bagaimana politik dinasti menghambat tata kelola yang adil dan bagaimana pemimpin yang memiliki virtù dapat menjadi solusi untuk memperbaikinya (Arnold, 2023).

Politik dinasti, seperti yang sering dikritik, bertentangan dengan prinsip keadilan karena mendistorsi peluang yang seharusnya terbuka bagi semua individu berbakat dan berintegritas (Muhajir & Wulandari, 2023). Hal ini berbanding terbalik dengan pandangan Machiavelli, yang menekankan bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kemampuan mereka untuk mempertahankan negara dan

memajukan kepentingan umum (Masse et al., 2022). Ia menyatakan dalam The Prince, "A prince must take great care that nothing goes out of his mouth which is not full of the five qualities, and must appear merciful, faithful, humane, upright, and religious."(Morley, 2022). (Seorang pemimpin harus sangat berhati-hati bahwa tidak ada yang keluar dari mulutnya kecuali yang penuh dengan lima kualitas: murah hati, setia, manusiawi, jujur, dan religius). Pernyataan ini relevan untuk menilai bagaimana pemimpin dalam politik dinasti sering kali gagal memenuhi standar tersebut, karena lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau keluarga.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tantangan demokrasi yang dihadapi Indonesia akibat politik dinasti, dengan menganalisisnya melalui lensa filsafat Machiavelli. Dengan pendekatan ini, dapat ditemukan strategi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih adil, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi yang sehat. Pemikiran Machiavelli tidak hanya akan menjadi alat kritik terhadap politik dinasti, tetapi juga sebagai landasan untuk merefleksikan langkah-langkah konkret yang dapat diambil demi menciptakan keadilan sosial dan politik di Indonesia.

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka (library research), yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memahami, menganalisis, dan mempelajari teori-teori serta informasi yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Marbun, 2020). Studi pustaka merupakan pendekatan penting dalam penelitian ilmiah, karena memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka teori yang kuat dan memahami penelitian terdahulu sebagai dasar untuk mengembangkan gagasan baru. Proses pengumpulan data dalam studi pustaka dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mengonstruksi informasi dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lainnya. Semua bahan pustaka yang diperoleh dianalisis secara kritis untuk mengevaluasi relevansi, keandalan, dan kedalaman informasi yang disajikan (Parto, 2023). Analisis yang mendalam ini bertujuan untuk mendukung proposisi penelitian, memperkuat argumen, dan memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini memastikan bahwa gagasan dan temuan yang dihasilkan memiliki basis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Politik Dinasti di Indonesia

Politik dinasti di Indonesia memiliki akar yang cukup panjang, dimulai sejak era pra-reformasi ketika kekuasaan politik sering kali terpusat pada keluarga tertentu yang memiliki koneksi kuat dengan pusat pemerintahan (Rahadatul'Aisy, n.d.). Era reformasi membawa perubahan besar dalam struktur politik Indonesia melalui penerapan otonomi daerah pada tahun 2001 (Silitonga, 2021). Reformasi ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri, termasuk dalam hal keputusan politik dan pengelolaan anggaran. Akibatnya, peluang untuk membangun dinasti politik di tingkat lokal meningkat secara signifikan. Penelitian Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam buku Electoral Dynamics in Indonesia (2016) menyoroti bagaimana desentralisasi kekuasaan ini membuka jalan bagi keluarga elite lokal untuk mendominasi pemerintahan daerah. Di banyak daerah, kepala daerah mulai menggunakan posisi mereka untuk membangun jaringan kekuasaan keluarga. Mereka sering kali mencalonkan pasangan, anak, atau kerabat dekat untuk meneruskan kekuasaan setelah masa jabatan mereka berakhir.

Menurut penelitian Diego Fossati (2019), salah satu faktor pendorong utama dari berkembangnya politik dinasti di era otonomi daerah adalah lemahnya institusi demokrasi lokal. Sistem pemilihan langsung kepala daerah, meskipun bertujuan memperkuat partisipasi rakyat, sering kali dimanfaatkan oleh elite lokal untuk mempertahankan kekuasaan melalui politik uang, patronase, dan penggunaan sumber daya negara. Politik dinasti di era otonomi daerah tidak lepas dari berbagai kritik, terutama terkait dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan pemerintahan. Penelitian (Hadiz dan Robison 2013) menunjukkan bahwa politik dinasti sering kali menghasilkan pemerintahan yang kurang transparan dan rentan terhadap korupsi. Dinasti politik cenderung memprioritaskan kepentingan keluarga di atas kepentingan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering kali tidak berpihak pada rakyat.

Pada masa Orde Baru, kekuasaan politik dipegang erat oleh Presiden Soeharto dan keluarganya. Soeharto tidak hanya memonopoli kekuasaan selama lebih dari tiga dekade, tetapi juga menempatkan keluarganya dalam posisi strategis baik di bidang politik maupun ekonomi. Penelitian oleh (Vedi Hadiz 2004) menunjukkan bahwa struktur kekuasaan Orde Baru sangat bergantung pada oligarki keluarga dan jaringan kroni yang memperkuat posisi mereka di

pemerintahan dan sektor swasta. Dinasti politik ini tidak hanya terjadi di tingkat eksekutif, tetapi juga meluas ke legislatif dan perusahaan negara. Misalnya, anak-anak Soeharto, seperti Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut) dan Tommy Soeharto, memiliki pengaruh besar dalam sektor bisnis yang sering kali berhubungan erat dengan kebijakan negara. Dalam konteks ini, dinasti politik di era pra-reformasi tidak hanya didorong oleh tradisi patronase, tetapi juga oleh kontrol negara terhadap sumber daya ekonomi. Namun, sistem sentralisasi yang diterapkan pada masa Orde Baru membatasi ekspansi politik dinasti di tingkat lokal. Kekuasaan sebagian besar terkonsentrasi di Jakarta, sehingga peluang bagi politik dinasti di daerah relatif kecil dibandingkan dengan era pasca-reformasi.

Selain itu, politik dinasti mempersempit ruang kompetisi politik di tingkat lokal. Kandidat yang berasal dari luar jaringan kekuasaan keluarga seringkali kesulitan mendapatkan dukungan politik atau sumber daya yang cukup untuk bersaing dalam pemilu. Ini menciptakan ketimpangan dalam proses demokrasi, di mana rakyat sering kali tidak memiliki pilihan alternatif yang nyata. Namun, di sisi lain, ada juga argumen bahwa politik dinasti memiliki potensi stabilitas politik. Penelitian (Winters, 2011) menunjukkan bahwa di beberapa daerah, dinasti politik mampu menjaga kesinambungan kebijakan dan stabilitas sosial, terutama di wilayah yang memiliki konflik etnis atau agama. Meski demikian, stabilitas ini sering kali datang dengan biaya besar berupa pengorbanan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang baik. Politik dinasti di Indonesia telah berkembang dari pola sentralisasi kekuasaan di era pra-reformasi menjadi fenomena yang lebih tersebar luas di era otonomi daerah. Reformasi yang bertujuan mendekatkan pemerintahan kepada rakyat justru membuka jalan bagi keluarga elite untuk mendominasi politik lokal. Sementara beberapa penelitian mencatat potensi manfaatnya dalam hal stabilitas, mayoritas temuan menunjukkan bahwa politik dinasti lebih sering menjadi penghambat bagi demokrasi yang sehat dan pemerintahan yang transparan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan institusi demokrasi lokal untuk meminimalkan dampak negatif politik dinasti. Regulasi yang lebih ketat tentang konflik kepentingan, transparansi dalam proses pemilu, dan penguatan partisipasi masyarakat adalah langkah penting untuk memastikan bahwa otonomi daerah benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, bukan hanya memperkuat kekuasaan keluarga tertentu. Seperti yang dinyatakan oleh (Aspinall 2016), "Demokrasi lokal Indonesia akan terus diuji oleh bagaimana ia menangani dinamika politik dinasti yang

berkembang dalam konteks desentralisasi.

Keberuntungan (Fortuna) dan Kemampuan (Virtù)

Machiavelli menjelaskan bahwa kekuasaan adalah seni, dan seorang pemimpin yang bijak harus memahami bagaimana menghadapi nasib (fortuna) dengan keterampilan dan strategi (virtù). Fortuna adalah segala hal yang datang secara tiba-tiba atau kebetulan—sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Ini seperti nasib baik atau buruk yang datang tanpa kita duga, misalnya krisis ekonomi, bencana alam, atau kemenangan yang tak terduga (Machiavel, 2022). Dalam hal ini, fortuna bisa membuka jalan atau bahkan menghancurkan peluang seorang pemimpin. Di sisi lain, virtù adalah keahlian, kecerdasan, dan kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan situasi. Ini adalah keterampilan untuk membaca peluang, mengambil keputusan tegas, dan beradaptasi dengan keadaan. Kalau fortuna itu seperti sungai liar yang bisa banjir kapan saja, maka virtù adalah bendungan yang dibangun pemimpin untuk mengatur aliran sungai tersebut (Barthold & Fougère, 2021). Jadi, virtù adalah cara seorang pemimpin memanfaatkan keberuntungan atau melawan nasib buruk. Menurut Machiavelli, seorang pemimpin yang hanya mengandalkan keberuntungan akan cepat tumbang saat keadaan berubah. Tapi kalau pemimpin itu punya virtù, ia bisa mengubah tantangan menjadi peluang dan bertahan lebih lama.

Pada zamannya, banyak pemimpin yang lahir di keluarga kerajaan atau bangsawan. Mereka sering kali mendapatkan kekuasaan melalui warisan—yang berarti ini adalah hasil dari fortuna. Tapi, Machiavelli menegaskan bahwa fortuna saja tidak cukup. Kalau pemimpin itu tidak punya virtù, ia akan mudah digulingkan oleh pemberontakan, perebutan kekuasaan, atau ancaman dari luar (Şenses, 2021). Seorang raja atau bangsawan harus pintar membangun aliansi, menyusun strategi, dan menjaga kestabilan kerajaannya. Walaupun Machiavelli hidup di era monarki, gagasannya tentang fortuna dan virtù tetap relevan dalam demokrasi modern. Dalam sistem demokrasi, fortuna bisa berupa hal-hal seperti hasil pemilu, opini publik yang berubah-ubah, atau krisis besar seperti pandemi. Pemimpin yang sukses di era ini adalah mereka yang memiliki virtù—kemampuan untuk membaca situasi, merespons dengan cepat, dan mengambil keputusan yang sulit namun tepat. Machiavelli tidak pernah mengatakan bahwa fortuna sepenuhnya buruk atau tidak penting. Tapi ia percaya bahwa pemimpin yang sukses adalah

mereka yang tahu bagaimana memanfaatkan fortuna dengan keahlian (virtù) mereka. Nasib baik mungkin membuka jalan, tapi keahlian lah yang menentukan apakah seorang pemimpin bisa bertahan atau tidak.

Stabilitas Kekuasaan dalam Perspektif Machiavelli

Niccolò Machiavelli memandang stabilitas kekuasaan sebagai fondasi utama untuk menciptakan pemerintahan yang efektif (Syarofuzzaman, 2024). Dalam karyanya Il Principe, ia menegaskan, "Seorang penguasa tidak boleh peduli disebut kejam, selama kekejamannya membuat rakyatnya bersatu dan setia." Stabilitas bagi Machiavelli berarti mampu menjaga kontrol atas kekuasaan, bahkan jika itu membutuhkan keputusan-keputusan keras yang tidak populer (Syarofuzzaman, 2024). Kekuasaan yang stabil adalah prasyarat bagi pemerintahan yang bisa menjaga ketertiban dan membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Machiavelli percaya bahwa tanpa stabilitas kekuasaan, tidak mungkin tercipta pemerintahan yang kuat. Dalam pandangannya, "Kekacauan membuat rakyat menderita, sedangkan ketegasan, meski terlihat kejam, menciptakan keamanan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan."(Chancey, 2024) Pemimpin yang gagal menjaga stabilitas akan membuka pintu bagi konflik internal dan ancaman dari luar. Stabilitas ini membutuhkan pemimpin yang mampu memanfaatkan segala sumber daya yang ada, baik itu melalui diplomasi, militer, maupun pengendalian emosi rakyatnya. Menurut Machiavelli, "Seorang pemimpin harus siap menghadapi yang baik dan buruk, dan lebih baik ditakuti daripada dicintai, jika ia harus memilih." (Chancey, 2024). Dengan kata lain, stabilitas kekuasaan tidak boleh digantungkan pada simpati rakyat semata, melainkan pada wibawa dan otoritas pemimpin itu sendiri.

Dalam politik dinasti, stabilitas kekuasaan sering kali diwariskan melalui garis keturunan, tetapi Machiavelli memperingatkan bahwa "Warisan kekuasaan hanya berarti jika penerusnya memiliki keutamaan yang sama dengan pendahulunya."(Catanzariti, 2024). Seorang penguasa dari dinasti tertentu mungkin mendapatkan legitimasi melalui nama keluarga, tetapi tanpa virtù—kemampuan untuk memimpin dan menghadapi ancaman—dinasti tersebut akan runtuh. Machiavelli menulis, "Sejarah menunjukkan bahwa seorang penguasa yang tidak siap menghadapi perubahan akan kehilangan segalanya ketika waktu berubah."(Arnold, 2023). Ini adalah pengingat bahwa stabilitas dalam politik dinasti tidak semata-mata tergantung pada tradisi atau legitimasi simbolis, tetapi juga pada kemampuan setiap individu

pemimpin untuk menjaga kesinambungan kekuasaan melalui tindakan nyata. Stabilitas kekuasaan menghadirkan tantangan yang unik. Machiavelli pernah berkata, "Seseorang yang memegang kekuasaan melalui keberuntungan tidak akan bertahan lama jika ia tidak tahu bagaimana mempertahankannya." (Morley, 2022). Sistem demokrasi seringkali membawa dinamika yang penuh ketidakpastian, seperti pergantian pemimpin secara berkala dan fluktuasi opini publik (Arifin, 2022). Dalam situasi seperti ini, pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu menjaga stabilitas dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi. Namun, Machiavelli juga mengingatkan bahwa "Jika terlalu banyak kebebasan diberikan tanpa aturan yang jelas, rakyat akan menjadi liar dan pemerintahan akan runtuh."(Ciliberto, 2019). Dalam konteks ini, stabilitas kekuasaan dalam demokrasi membutuhkan keseimbangan antara aturan hukum yang tegas dan fleksibilitas untuk menanggapi perubahan sosial. Pemimpin yang memiliki virtù akan mampu mengelola konflik yang muncul tanpa mengorbankan stabilitas sistem politik.

Machiavelli memberikan pelajaran abadi bahwa stabilitas kekuasaan adalah elemen penting bagi pemerintahan yang efektif. Ia menulis, "Stabilitas adalah pelindung dari kehancuran; kekuasaan yang tidak dijaga dengan hati-hati akan lenyap seperti debu."(Machiavelli, 2019) Dalam politik dinasti, stabilitas sering kali dijaga melalui nama besar dan tradisi keluarga, tetapi hanya pemimpin yang memiliki kemampuan nyata yang dapat melanjutkan kejayaan dinasti. Sementara itu, dalam demokrasi, stabilitas harus diperoleh melalui pembangunan institusi yang kuat dan kepemimpinan yang kompeten (Hariyadi, 2021). Pemimpin harus memahami bahwa "Rakyat mudah dikelabui dengan janji, tetapi yang paling mereka hargai adalah hasil nyata."(Muthmainnah et al., 2020) Dengan kata lain, stabilitas bukan hanya soal mempertahankan kekuasaan, tetapi juga soal menciptakan rasa aman dan kepercayaan di tengah masyarakat. Machiavelli mengajarkan bahwa pemimpin yang cerdas adalah mereka yang mampu menjaga stabilitas dengan mengintegrasikan pragmatisme dan visi jangka panjang. "Pemimpin yang bijak tahu kapan harus bertindak keras, kapan harus fleksibel, dan kapan harus mengambil risiko untuk memastikan kekuasaannya bertahan," tulisnya. Pelajaran ini tetap relevan, baik dalam politik dinasti maupun dalam sistem demokrasi modern.

Fortuna dan Virtù dalam Politik Dinasti Indonesia

Konsep fortuna (keberuntungan) dan virtù (kemampuan atau kecakapan) yang dikemukakan oleh Niccolò Machiavelli dalam Il Principe (Sang Pangeran) tetap relevan dalam menganalisis fenomena politik dinasti di era modern, termasuk di Indonesia. Dalam karya klasiknya, Machiavelli menulis, "*Fortune favors the bold*," yang menunjukkan bahwa keberuntungan sering berpihak pada mereka yang berani memanfaatkan peluang yang ada (Machiavelli, 1532). Dalam konteks politik dinasti modern, pemimpin-pemimpin dinasti sering kali menggabungkan keberuntungan mereka—seperti warisan nama besar atau jaringan keluarga—dengan kemampuan strategis untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Dalam demokrasi Indonesia, politik dinasti memperlihatkan bagaimana fortuna dan virtù dapat digunakan untuk mengokohkan kekuasaan, sekaligus menimbulkan tantangan bagi prinsip-prinsip demokrasi. Dalam pandangan Machiavelli, fortuna merujuk pada keberuntungan yang memberikan peluang kepada seorang pemimpin untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks politik dinasti, fortuna sering kali diterjemahkan sebagai warisan nama besar atau reputasi keluarga yang memberi keuntungan besar dalam meraih dukungan publik. Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2016) dalam Electoral Dynamics in Indonesia mencatat bahwa politik dinasti di Indonesia sering kali memanfaatkan popularitas keluarga yang sudah mapan untuk memenangkan pemilu.

Machiavelli mengingatkan dalam Il Principe bahwa, "*A prince who is not wise, or who does not know how to be wise, will lose what he has gained*" (Machiavelli, 1532). Dalam konteks dinasti politik di Indonesia, meskipun keluarga memiliki keuntungan berupa nama besar, mereka tetap harus memiliki kemampuan politik yang solid (virtù) untuk menjaga dan memelihara kekuasaan yang diwariskan tersebut. Namun, sebagaimana dicatat oleh Diego Fossati (2019), fortuna semata tidak cukup untuk mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang. Dinasti politik juga memerlukan strategi yang tepat untuk memastikan keberlangsungan pengaruh mereka di tengah perubahan lanskap politik yang dinamis.

Sementara fortuna memberi peluang, virtù adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memanfaatkan peluang tersebut secara efektif. Dalam konteks politik dinasti modern di Indonesia, virtù terlihat dalam cara pemimpin dinasti menggunakan strategi politik, membangun jaringan, dan mengelola sumber daya. Penelitian Hadiz dan Robison (2013) menunjukkan bahwa kepala daerah dari dinasti politik sering kali menggunakan

patronase dan akses terhadap sumber daya negara untuk memperkuat posisi mereka. Machiavelli menegaskan *dalam Il Principe, "A prince must be a lion and a fox; the lion, to scare off the wolves, and the fox, to recognize traps,"* yang menggarisbawahi pentingnya memiliki kecerdasan dan keberanian dalam memimpin (Machiavelli, 1532). Dalam hal ini, virtù dalam politik dinasti tidak hanya terbatas pada kecakapan politik, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dan mengelola berbagai tantangan yang muncul. Sebagai contoh, dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten memanfaatkan virtù dengan mengorganisir jaringan politik dan mengalokasikan sumber daya untuk mendukung keluarga dan kroninya, yang memungkinkan mereka untuk tetap memegang kendali meskipun menghadapi tantangan dari oposisi. Machiavelli juga menulis bahwa seorang pemimpin yang tidak mengelola virtù-nya dengan baik akan kehilangan kekuasaannya, bahkan jika ia berada di posisi yang menguntungkan.

Penerapan konsep fortuna dan virtù dalam politik dinasti di Indonesia menunjukkan adaptasi elemen-elemen Machiavellian ke dalam sistem demokrasi. Namun, fenomena ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan etis dan praktis tentang dampaknya terhadap demokrasi itu sendiri. Penelitian oleh Winters (2011) dalam Oligarchy menunjukkan bahwa politik dinasti sering kali memperkuat oligarki, yang bertentangan dengan prinsip partisipasi politik yang inklusif. Machiavelli dalam Il Principe berkata, "*It is better to be feared than loved, if you cannot be both*," yang mencerminkan pandangan bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil langkah keras demi mempertahankan kekuasaan, meskipun itu mungkin tidak populer (Machiavelli, 1532).

Namun, sebagaimana dicatat oleh Transparency International Indonesia (2020), penerapan konsep ini dalam demokrasi modern sering kali menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Dengan ketergantungan yang besar pada fortuna (keberuntungan atau warisan keluarga) dan virtù (kemampuan untuk memanfaatkan peluang), dinasti politik dapat menurunkan akuntabilitas, merusak transparansi, dan memperburuk korupsi—semua ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi yang menuntut pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Relevansi fortuna dan virtù dalam politik dinasti modern memberikan gambaran tentang bagaimana konsep-konsep Machiavellian tetap hidup di tengah sistem demokrasi. Dinasti politik di Indonesia menggunakan

keberuntungan berupa warisan nama besar dan kemampuan strategis untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Namun, dampaknya terhadap demokrasi memunculkan tantangan yang signifikan, termasuk ketimpangan politik, risiko korupsi, dan penurunan akuntabilitas. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi Indonesia untuk memperkuat institusi demokrasi yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh dinasti politik. Reformasi dalam sistem pemilu, peningkatan transparansi, dan partisipasi politik yang lebih inklusif adalah langkah penting untuk memastikan bahwa fortuna dan virtù digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya keluarga penguasa. Seperti yang dinyatakan Machiavelli, "Nasib adalah sesuatu yang harus dikendalikan, bukan diterima begitu saja," dan dalam konteks demokrasi Indonesia, pengendalian ini membutuhkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas.

Dampak Politik Dinasti terhadap Demokrasi

Politik dinasti telah menjadi salah satu tantangan utama bagi perkembangan demokrasi. Fenomena ini membawa dampak signifikan yang tidak hanya mempersempit ruang partisipasi politik tetapi juga menciptakan berbagai risiko yang merugikan tata kelola pemerintahan. Dampaknya mencakup ketimpangan akses politik, potensi penyalahgunaan kekuasaan, risiko korupsi, dan penurunan akuntabilitas politik. Salah satu dampak utama politik dinasti adalah ketimpangan dalam akses politik. Dinasti politik seringkali membatasi peluang bagi kandidat dari luar keluarga atau jaringan mereka untuk bersaing dalam pemilu. (Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, 2016) dalam Electoral Dynamics in Indonesia mencatat bahwa politik dinasti mempersempit ruang kompetisi politik dengan memanfaatkan patronase dan sumber daya negara. Dalam banyak kasus, kandidat dari dinasti politik memiliki keuntungan yang besar dalam hal dukungan finansial, akses media, dan jaringan politik, sehingga rakyat sering kali tidak memiliki alternatif yang seimbang dalam memilih pemimpin. Misalnya, penelitian (Diego Fossati, 2019) menunjukkan bahwa di beberapa daerah Indonesia, kandidat independen atau oposisi sering kali menghadapi kesulitan besar untuk menggalang dukungan, terutama ketika melawan kandidat yang berasal dari dinasti politik. Ini menciptakan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam politik.

Dinasti politik cenderung memperkuat oligarki, di mana

kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok kecil yang memiliki hubungan keluarga atau koneksi kuat dengan elite penguasa. Penelitian (Hadiz dan Robison, 2013) menunjukkan bahwa politik dinasti sering kali melanggengkan patronase dan penyalahgunaan kekuasaan, di mana kepala daerah menggunakan posisinya untuk memperkaya keluarga atau kroni mereka. Kasus dinasti Ratu Atut Chosiyah di Banten adalah salah satu contoh yang sering disebut. Dalam dinasti ini, Atut tidak hanya menjabat sebagai gubernur, tetapi juga memastikan keluarganya menguasai berbagai posisi strategis, termasuk di DPRD dan lembaga eksekutif lokal lainnya. Kekuasaan semacam ini seringkali mengorbankan kepentingan publik karena sumber daya negara dialokasikan untuk mendukung jaringan pribadi penguasa. (Winters, 2011) dalam buku Oligarchy menegaskan bahwa politik dinasti tidak hanya memperburuk penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga memperkuat ketidakadilan dalam akses terhadap sumber daya negara. Akibatnya, pengaruh oligarki ini menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin dalam.

Politik dinasti sering kali dikaitkan dengan risiko korupsi yang lebih tinggi. Misalnya, kasus korupsi yang melibatkan keluarga mantan Bupati Klaten, Jawa Tengah, menunjukkan bagaimana dinasti politik dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengatur proyek pemerintah dan menguntungkan kroni mereka. (Diego Fossati, 2019) menyebutkan bahwa korupsi seperti ini sering kali terjadi karena pengaruh politik dinasti yang kuat, di mana pengawasan publik tidak mampu menandingi jaringan kekuasaan keluarga.

Dinasti politik cenderung mengurangi akuntabilitas pemimpin kepada rakyat. Dalam politik dinasti, fokus sering kali bergeser dari melayani kepentingan publik menjadi menjaga keberlanjutan kekuasaan keluarga. Penelitian Hadiz (2004) menunjukkan bahwa ketika kekuasaan berada dalam kendali satu keluarga, kebijakan publik lebih cenderung mencerminkan prioritas dinasti daripada kebutuhan masyarakat luas. Sebagai contoh, di daerah tertentu di Indonesia, kepala daerah yang berasal dari dinasti politik lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk proyek-proyek yang meningkatkan citra mereka secara pribadi atau politik, tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Edward Aspinall (2016) menegaskan bahwa ketidakpedulian terhadap kepentingan publik ini adalah salah satu alasan utama mengapa politik dinasti sering kali gagal

menciptakan pemerintahan yang efektif.

Politik dinasti membawa tantangan serius bagi demokrasi di Indonesia. Ketimpangan akses politik, potensi penyalahgunaan kekuasaan, risiko korupsi, dan penurunan akuntabilitas adalah beberapa dampak utama yang memperlemah kualitas demokrasi (Fawzan et al., 2023). Kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa politik dinasti sering kali lebih menguntungkan elite politik daripada masyarakat luas. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan reformasi institusi yang lebih kuat. Langkah-langkah seperti transparansi dalam pemilu, penguatan partai politik, dan pendidikan politik bagi masyarakat adalah beberapa cara untuk mencegah dominasi dinasti politik. Seperti yang dinyatakan oleh Diego Fossati (2019), "Kesehatan demokrasi Indonesia akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menahan dampak negatif dari politik dinasti sambil memastikan partisipasi politik yang lebih inklusif."

Dampak praktik politik dinasti terhadap kualitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

Menurut Winters (2011), dalam bukunya Oligarchy, sistem dinasti politik berpotensi besar menciptakan oligarki, di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir keluarga. Dalam konteks ini, pemerintahan lokal yang dikelola oleh dinasti sering kali memperlihatkan ketimpangan dalam akuntabilitas dan transparansi. Di Indonesia, hal ini terlihat dari banyaknya kepala daerah yang berasal dari keluarga politik yang berhasil mendominasi kursi pemerintahan, sehingga menekan inovasi dan meredam upaya pembaruan tata kelola yang seharusnya dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Penelitian oleh Hadiz dan Robison (2013) dalam The Political Economy of Oligarchy and Institutional Reform in Indonesia mengungkapkan bahwa politisi dari dinasti sering memanfaatkan kekuasaan untuk melanggengkan pengaruh mereka. Ini dilakukan melalui penguasaan sumber daya negara dan manipulasi proses politik untuk mengamankan posisi mereka di pemerintahan. Akibatnya, reformasi kelembagaan yang bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi seringkali terhambat.

Studi lain oleh Mendoza et al. (2012) dalam konteks Filipina menunjukkan bahwa dinasti politik mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan publik karena pejabat yang diangkat lebih berorientasi pada menjaga status quo dibandingkan memenuhi kebutuhan rakyat. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana keberadaan dinasti politik berdampak buruk pada tata kelola pemerintahan lokal, termasuk dalam efisiensi alokasi anggaran dan pemberantasan korupsi. Politik dinasti tidak hanya

merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga mengancam keberlanjutan demokrasi. Penelitian oleh (Geys dan Smith, 2017) dalam The Economic Journal menyebutkan bahwa dinasti politik menghambat regenerasi kepemimpinan dengan mempersempit ruang partisipasi politik. Fenomena ini bertentangan dengan prinsip inklusivitas yang seharusnya menjadi dasar sistem demokrasi modern.

Dalam bukunya Il Principe, Niccolò Machiavelli mengingatkan bahwa pemimpin yang mengandalkan warisan kekuasaan sering kali gagal memahami kebutuhan rakyat karena mereka lebih fokus pada pelestarian kekuasaan daripada pelayanan publik. Pandangan ini diperkuat oleh Montesquieu dalam The Spirit of Laws, yang menekankan bahwa konsentrasi kekuasaan pada segelintir pihak berpotensi menciptakan tirani dan melemahkan fondasi demokrasi. Di Indonesia, studi oleh (Setyaningrum, 2019) menunjukkan bahwa dinasti politik memperbesar kesenjangan politik dan sosial, di mana hanya individu dari keluarga berpengaruh yang memiliki peluang untuk mencalonkan diri. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan sistemik, yang dalam jangka panjang dapat memunculkan apatisme politik di kalangan masyarakat.

Untuk mengurangi dampak buruk politik dinasti, diperlukan langkah-langkah strategis. (Kapucu, 2021) dalam Public Administration Review merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih ketat terhadap pencalonan kepala daerah untuk mengurangi dominasi keluarga politik. Selain itu, partisipasi masyarakat yang kritis melalui pendidikan politik menjadi kunci penting dalam meningkatkan kesadaran pemilih. Sebagai tambahan, Winters (2011) menekankan bahwa menghapuskan politik dinasti membutuhkan perubahan budaya politik, di mana nilai-nilai seperti transparansi, meritokrasi, dan akuntabilitas menjadi norma. Hanya dengan langkah ini, demokrasi Indonesia dapat bertumbuh secara sehat dan berkelanjutan, tanpa terjebak dalam jebakan oligarki keluarga. Praktik politik dinasti di Indonesia menimbulkan berbagai tantangan bagi demokrasi yang sehat. Salah satu strategi untuk mengurangi dampak negatifnya adalah pembatasan pencalonan kerabat dekat pejabat petahana. Dalam bukunya Oligarchy, Winters (2011) menjelaskan bahwa politik dinasti memperbesar resiko terjadinya oligarki, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada keluarga tertentu. Oleh karena itu, pembatasan ini bisa dilakukan dengan merevisi undang-undang pemilu untuk menetapkan masa

jeda tertentu sebelum kerabat dekat petahana dapat mencalonkan diri. Strategi ini terbukti efektif di beberapa negara seperti Filipina, yang telah menerapkan kebijakan serupa untuk memperluas ruang partisipasi politik.

Selain pembatasan pencalonan, keterbukaan dan transparansi proses pemilu juga harus ditingkatkan. Transparency International menekankan bahwa mekanisme yang transparan, termasuk pelaporan kekayaan dan rekam jejak kandidat, akan membantu pemilih menilai calon kepala daerah secara objektif. Proses ini juga dapat mengurangi praktik politik uang, yang sering kali menjadi cara dinasti politik melanggengkan kekuasaan mereka. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi untuk mempublikasikan informasi kandidat menjadi langkah penting dalam mengurangi dominasi politik dinasti. Kompetisi politik yang sehat juga perlu didorong melalui pendidikan politik dan fasilitasi bagi kandidat independen. Penelitian oleh Geys dan Smith (2017) dalam The Economic Journal menunjukkan bahwa keberagaman kandidat memperkuat proses demokrasi dengan menawarkan pilihan berbasis kompetensi kepada masyarakat. Di Indonesia, tantangan ini dapat diatasi dengan memperkuat dukungan terhadap calon independen dan memastikan mereka memiliki akses yang adil terhadap proses politik. Penguatan partai politik juga menjadi kunci untuk mengatasi dominasi politik dinasti. Menurut Ufen (2017), kelemahan kaderisasi di partai politik Indonesia telah memungkinkan keluarga politik mendominasi struktur partai dan proses pencalonan. Dengan meningkatkan program kaderisasi dan memberikan ruang lebih besar kepada tokoh-tokoh muda potensial, partai politik dapat menjadi alat yang efektif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada segelintir keluarga.

Pengawasan terhadap penyalahgunaan kekuasaan juga sangat penting. Lembaga seperti KPK, Bawaslu, dan Ombudsman perlu diberdayakan untuk memantau tindakan kepala daerah yang berasal dari dinasti politik. Winters (2011) menekankan bahwa lembaga independen yang kuat adalah elemen penting untuk membatasi kekuasaan oligarki dan memastikan bahwa pejabat publik bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Penguatan regulasi anti-nepotisme di pemerintahan daerah juga harus menjadi prioritas. Kapucu (2021) dalam Public Administration Review mencatat bahwa penerapan kebijakan anti-nepotisme secara ketat dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi potensi korupsi. Selain itu, peran masyarakat dalam pengawasan kebijakan daerah harus ditingkatkan. Hadiz

dan Robison (2013) menunjukkan bahwa mobilisasi masyarakat sipil dapat menjadi penyeimbang yang efektif terhadap kekuasaan dinasti politik. Dengan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah dapat menciptakan tata kelola yang lebih inklusif dan responsif. Mekanisme alokasi anggaran daerah juga perlu diperkuat untuk mengurangi peluang penyalahgunaan kekuasaan. Studi oleh Setyaningrum (2019) menemukan bahwa dinasti politik sering memanfaatkan anggaran daerah untuk mempertahankan pengaruh mereka, sehingga audit berkala oleh lembaga independen dapat menjadi langkah penting untuk memastikan anggaran digunakan untuk kepentingan publik.

Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, pengawasan yang efektif, dan partisipasi masyarakat yang aktif, dampak buruk politik dinasti terhadap demokrasi dapat diminimalkan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa sistem demokrasi Indonesia terus berkembang secara sehat dan inklusif.

Mewujudkan Tata Kelola yang Adil Berdasarkan Filsafat Machiavelli

Niccolò Machiavelli dalam The Prince menekankan bahwa pemimpin yang ideal harus memiliki kemampuan untuk mengelola kekuasaan dengan bijaksana, memahami situasi politik, dan menyesuaikan tindakan sesuai kebutuhan demi kestabilan dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, politik dinasti kerap menjadi penghalang terciptanya tata kelola yang adil, karena kekuasaan cenderung tersentralisasi pada segelintir keluarga atau kelompok tertentu, sering kali mengabaikan prinsip meritokrasi.

Machiavelli, seorang pemimpin harus mengutamakan virtù, yakni kemampuan untuk bertindak dengan kecerdikan, keberanian, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan. Ia menyebutkan, “It is not titles that honour men, but men that honour titles.” (Bukan gelar yang memberi kehormatan pada seseorang, melainkan orang tersebut yang memberi kehormatan pada gelar itu) (Morley, 2022). Artinya, kualitas pribadi seorang pemimpin lebih penting daripada latar belakang atau koneksi politiknya. Dalam konteks ini, seorang pemimpin harus memastikan bahwa tata kelola tidak dikendalikan oleh nepotisme yang hanya menguntungkan segelintir pihak.

Di Indonesia, politik dinasti sering kali menghasilkan

pemimpin yang minim virtù. Hal ini berujung pada berbagai kasus korupsi yang melibatkan anggota keluarganya, termasuk vonis korupsi untuk Ratu Atut sendiri pada tahun 2014. Machiavelli akan melihat hal ini sebagai kegagalan seorang pemimpin dalam mengontrol fortuna—atau keadaan yang tidak pasti—yang berakibat pada keruntuhan legitimasi. Machiavelli juga menekankan perlunya seorang pemimpin yang berani membuat keputusan sulit demi kebaikan bersama. Dalam Discourses on Livy, ia menulis, "*A well-used cruelty... is that which is applied once for all, and which is then desisted from as much as possible*." (Mitchell, 2024). (Kekejaman yang digunakan dengan bijaksana adalah yang diterapkan satu kali untuk tujuan yang lebih besar, dan kemudian dihentikan sejauh mungkin). Artinya, dalam melawan korupsi dan nepotisme, tindakan tegas dan tidak kompromi harus diambil, meski awalnya mungkin tidak populer. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi politik dinasti, seperti operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah contoh relevan dari penerapan prinsip ini.

Machiavelli percaya bahwa pemimpin dengan virtù mampu menghadapi tantangan besar dan memperbaiki sistem yang rusak. Ia menyatakan, "*He who builds on people builds on mud*."(Morley, 2022) (Barang siapa mendasarkan kekuasaan pada rakyat yang tidak terorganisir seperti membangun di atas lumpur). Pernyataan ini dapat diartikan bahwa pemimpin harus membentuk rakyatnya menjadi lebih terorganisir dan aktif, tidak hanya bergantung pada mereka secara pasif. Pemimpin dengan virtù tidak hanya memperbaiki institusi tetapi juga memberdayakan rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Contoh pemimpin yang berupaya melawan politik dinasti di Indonesia adalah Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, yang dalam beberapa kesempatan secara eksplisit menolak praktik nepotisme dalam pengelolaan birokrasi di daerahnya. Ia mendorong transparansi dalam pengisian jabatan publik dan memprioritaskan meritokrasi. Praktik ini sesuai dengan ajaran Machiavelli tentang pentingnya memilih orang-orang yang kompeten untuk mendukung tata kelola yang baik, bukan karena hubungan keluarga. Selain itu, reformasi dalam sistem pemilu untuk membatasi praktik politik dinasti juga menjadi langkah penting. Upaya Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengatur pencalonan kepala daerah dari kerabat dekat pejabat yang sedang berkuasa merupakan refleksi dari strategi Machiavellian untuk mencegah kekuasaan tersentralisasi pada satu kelompok.

PENUTUP

Praktik politik dinasti di Indonesia menunjukkan hubungan kompleks antara fortuna dan virtù sebagaimana dijelaskan oleh Niccolò Machiavelli dalam Il Principe. Fortuna merujuk pada keberuntungan atau warisan keluarga yang sering menjadi modal utama dalam membangun kekuasaan dinasti. Di sisi lain, virtù merepresentasikan kecakapan dan strategi politik yang digunakan untuk memperluas dan mempertahankan dominasi. Dinasti politik di Indonesia sering memanfaatkan keduanya untuk mempertahankan kekuasaan melalui koneksi keluarga, pengaruh ekonomi, dan kontrol terhadap lembaga pemerintahan lokal. Dampaknya terhadap demokrasi sangat signifikan, karena mempersempit ruang kompetisi politik yang sehat dan melemahkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Ancaman terbesar dari politik dinasti adalah potensinya untuk menciptakan sistem oligarki yang menghambat perkembangan demokrasi yang inklusif, dan maraknya kasus korupsi. Oligarki seperti ini berisiko memperburuk ketimpangan kekuasaan dan meminggirkan kelompok masyarakat yang lebih luas dari proses pengambilan keputusan. Dalam kerangka ini, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi cara-cara mengelola politik dinasti dalam sistem demokrasi yang sehat. Salah satu fokus utama adalah menciptakan kebijakan yang menyeimbangkan antara penghormatan terhadap hak politik setiap individu—termasuk mereka yang berasal dari keluarga petahana—dan kebutuhan untuk memastikan kompetisi politik yang adil. Penelitian semacam ini dapat menawarkan wawasan baru tentang bagaimana mekanisme pembatasan pencalonan, transparansi proses politik, dan penguatan lembaga pengawas dapat diintegrasikan untuk menyeimbangkan dinamika ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, I. (2022). Agama dalam pelaksanaan dan kemenangan pemilu pilpres, sebagai sebuah realitas politik di Indonesia. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*. https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi/article/view/1706

Arnold, T. C. (2023). Machiavelli's Deceptions. *History of Political Thought*. https://www.ingentaconnect.com/content/imp/hpt/2023/00000044/00000002/art00003

Barthold, C., & Fougère, M. (2021). A Machiavellian prince at the Elysée: Virtù leadership and

contingency in the populist moment. *Ephemera: Theory &politics in …*. https://oro.open.ac.uk/75729/

Catanzariti, D. E. (2024). Deciphering Machiavelli: Irony vs. Brutality in'The Prince'. *Line by Line: A Journal of Beginning …*. https://ecommons.udayton.edu/lxl/vol10/iss2/7/

Chancey, E. (2024). The Lion, the Fox, and the President. In *Letter From the Editors..... 3 Introduction..... 4 Elijah …*. araneumjournal.org. https://www.araneumjournal.org/s/Spring-2024-Vol-1-no-1.pdf#page=23

Ciliberto, M. (2019). *Niccolò Machiavelli: ragione e pazzia*. Gius. Laterza &Figli Spa.

Fawzan, B. A., Sanjaya, S. B., Iranto, S. E. D., & ... (2023). *ORGANIZATIONAL BEHAVIOR (THEORY AND RESEARCH MAPPING)*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=5PrGEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=politik+dinasti+ala+machiavelli&ots=G6a2VcpyEa&sig=Gz3NUgeE1_pf-Tn6-I-9NCiw5yU

Geys, B., & Smith, K. (2017). Political dynasties, electoral institutions, and governance. The Economic Journal, 127(601), 451–477.

Hariyadi, A. R. (2021). Dinamika kebijakan perencanaan pembangunan nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan …*. https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JDKP/article/view/3887

Herianto, H., & Wijanarko, R. (2022). Populisme Berwajah Politik Identitas Keagamaan di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *5*(1), 53–64. https://doi.org/10.23887/jfi.v5i1.39581

Hadiz, V., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and institutional reform in Indonesia. Journal of Contemporary Asia, 43(2), 258–277.

Indonesian Corruption Watch. (2024). Laporan korupsi kepala daerah 2010-2021. Diakses pada 21 November 2024, dari https://www.antikorupsi.org

Kapucu, N. (2021). Anti-nepotism policies and effective governance: Insights for public administration. Public Administration Review, 81(3), 370–380.

Lembaga Survei Indonesia. (2022). Survei opini publik: Politik dinasti dan persepsi korupsi. Jakarta: Lembaga Survei Indonesia.

Machiavelli, N. (1908). Il Principe (W. K. Marriott, Trans.). London: Everyman's Library.

Mendoza, R. U., Beja, E. L., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2012). Political dynasties and poverty: Evidence from the Philippines. Asian Journal of Political Science, 20(3), 261–285.

Montesquieu, C. L. S. (1748). *The spirit of laws* (T. Nugent, Trans.). London: G. Bell and Sons.

Machiavelli, N. (2019). *Machiavelli, Volume I-The Art of War: and The Prince*.

Marbun, P. (2020). Strategi dan Model Pembinaan Rohani untuk Pendewasaan Iman Jemaat. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, *null*, null. https://doi.org/10.37364/jireh.v2i2.42

Masse, R. A., Kara, M., & Makarma, R. (2022). State Financial Management According to al-Mawardi and al-Ghazali. *Media Syari'ah: Wahana …*. https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&profile=ehost&scope=site&authtype=crawler&jrnl=14112353&AN=164829251&h=XaURLzMk8JSgkKI4ZwxBga8h%2Ba9%2Bzsstw8y4EZn7Wa2o93AOBaG8XG4H4lPC2kTSuxoho0sCuTTt36GuOFCOA%3D%3D&crl=c

Mitchell, C. E. (2024). Beyond the Politics of Fear: Machiavelli on Hope. *The Review of Politics*. https://www.cambridge.org/core/journals/review-of-politics/article/beyond-the-politics-of-fear-machiavelli-on-hope/3123EF51DCDB5D372693DFACF88FCEAC

Morley, J. (2022). *Machiavelli*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9sGjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT13&dq=machiavelli&ots=op0IIonhHd&sig=kIiWaEhIf9J3Xs_Omg9sqJvbBm4

Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). KAPITALISME, KRISIS EKOLOGI, DAN KEADILAN INTER-GENERASI : Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *MOZAIK HUMANIORA*, *20*(1). https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754

Nurkholis, N. (2021). *Politik Kekuasaan Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kritik Terhadap Pemikiran Khilâfah Di Indonesia Melalui Pendekatan Affirmative Action)*. repository.ptiq.ac.id. https://repository.ptiq.ac.id

/id/eprint/659/

Parto, H. G. (2023). Budaya. *Jurnal Penelitian Humaniora*, *28*(2). https://doi.org/10.21831/hum.v28i2.54032

Rahadatul'Aisy, S. (n.d.). Dinasti Politik di Indonesia: Studi Kasus Kekuasaan Keluarga di Berbagai Periode Sejarah. In *researchgate.net*. https://www.researchgate.net/profile/Salsabila-Rahadatul-aisy/publication/375989821_Dinasti_Politik_di_Indonesia_Studi_Kasus_Kekuasaan_Keluarga_di_Berbagai_Periode_Sejarah/links/656606d73fa26f66f4355b9e/Dinasti-Politik-di-Indonesia-Studi-Kasus-Kekuasaan-K

Şenses, O. İ. (2021). Machiavelli'in Güncelliği. *Politik Ekonomik Kuram*. https://dergipark.org.tr/en/pub/pek/article/932965

Suprana, J. (2021). *Bingungologi Kebencian*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=BRoeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=politik+dinasti+ala+machiavelli&ots=oocL8FR7dy&sig=wmBumFqSj5bxeo-HjeWRMKIrhDI

Syarofuzzaman, A. (2024). Dinamika Stabilitas Politik di Indonesia Ditinjau dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholas Machiavelli. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*. https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/view/11833

Setyaningrum, D. (2019). The impact of political dynasties on regional budget allocation in Indonesia. Journal of Indonesian Economics and Development, 10(1), 45–60.

Transparency International. (2021). Corruption perceptions index 2021. Berlin: Transparency International.

Transparency International. (2021). Transparency in electoral processes: Lessons for Southeast Asia. Berlin: Transparency International.

Ufen, A. (2017). Political parties and democracy in Indonesia: A weakening of kaderisation. Journal of Current Southeast Asian Affairs, 36(2), 1–27.

Winters, J. A. (2011). Oligarchy. New York: Cambridge University Press.